



Merusak Nama Baik Jogjakarta

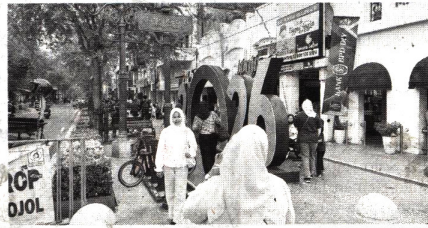
Pengelola Parkir hingga Pelaku Usaha Diminta Tidak Nuthuk saat Nataru

JOGIA - Memasuki libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) permasalahan seperti praktik parkir *nuthuk* sering ditemukan, khususnya di Kota Jogja. Untuk mengantisipasi, Pemprov DIJ mengimbau wisatawan untuk memanfaatkan kantong parkir resmi milik pemerintah supaya terhindar dari praktik *nuthuk*.

"Jika menginginkan kepastian tarif dan keamanan, kami mengimbau masyarakat parkir di tempat-tempat yang telah ditentukan pemerintah daerah," ujar Sekretaris Provinsi (Sekprov) DIJ Ni Made Dwipati Indrayanti kemarin (21/12).

Pemprov hanya bisa melakukan monitoring terkait penerapan biaya parkir hanya di kantong parkir milik pemerintah. Kebijakan tarif parkir juga telah diatur melalui Peraturan Wali Kota Jogja Nomor 149 Tahun 2020 sebagai turunan dari Perda Nomor 2 Tahun 2019. Tempat khusus parkir (TKP) milik pemerintah, tarif parkir roda empat ditetapkan sebesar Rp 5.000 untuk dua jam pertama, kemudian mengalami penyesuaian sebesar 50 persen pada jam berikutnya. "TKP swasta menerapkan tarif sesuai kebijakan masing-masing pengelola," tandasnya.

Ia juga menyinggung terkait pengaturan parkir di tepi jalan. Ketentuan itu telah diatur secara rinci dalam Perda tentang



SWAFOTO: Wisatawan sedang mengunjungi kawasan Malioboro Jogja.

Perparkiran. Dalam aturan itu dituliskan terkait lokasi yang diizinkan untuk parkir serta mekanisme penegakan hukumnya.

"Pemkot Jogja telah menetapkan ruas-ruas jalan yang diperbolehkan untuk kegiatan parkir, sehingga tidak semua titik dapat digunakan sesuka hati," tandasnya.

Beberapa lokasi yang parkir yang disediakan pemerintah yakni TKP Ketandan yang dapat menampung kendaraan roda dua maupun empat. TKP Ketandan memiliki bangunan tiga lantai. Lantai pertama dapat menampung 117 motor dan 76 Mobil. Lantai dua menampung 84 motor dan 11 mobil. Lantai tiga khusus untuk motor, yakni sebanyak 334 motor.

Secara keseluruhan, daya tampung tahap pertama mencapai 535 motor dan 87 mobil. "Parkir Ketandan telah siap dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat," katanya.

Pemkot Jogja juga tengah menyiapkan pengelolaan parkir roda empat di Kawasan Kridosono. Beberapa lokasi yang telah dipersiapkan itu dapat dimanfaatkan masyarakat se-

lama masa angkutan Nataru. Made, sapaan akrabnya, juga meminta kepada masyarakat agar ikut melakukan pengawasan segala bentuk pelanggaran lalu lintas selama Nataru. Sebab, pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan tidak dapat dilakukan secara menyeluruh di setiap titik secara bersamaan. Terpisah, Ketua DPRD DIJ

Nuryadi juga menegaskan kepada pengelola parkir maupun pelaku usaha di bidang pariwisata agar tidak *aji mumpung* dengan mencaari keuntungan secara berlebihan. Hal tersebut penting dilakukan agar para wisatawan tidak kapok untuk berkunjung ke Jogjakarta.

"Pada waktu kita mencari rezeki, itu bisa dengan baik, wajar-wajar saja. Sebaiknya kita kalau berdagang, ya sebaiknya pakai daftar harga, jangan *nuthuk*," ujarnya.

Menurutnya, *nuthuk* harga dinilai akan berimbas pada jangka panjang. Selain itu juga juga berpotensi merusak nama baik Jogjakarta khususnya dalam menjamu para wisatawan. Kemudian pentingnya menjaga sikap dalam menyambut wisatawan.

Menurutnya, keramahan warga menjadi salah satu daya tarik utama yang membuat wisatawan betah dan ingin kembali berkunjung.

"Artinya kita juga bisa menyapa dengan baik, bisa menerima dengan baik, bahkan momentum masyarakat yang datang di Jogjakarta itu tidak sekedar datang, tapi melihat, membeli, dan mungkin bisa menginap di sini," paparnya.

Sektor pariwisata menjadi tulang punggung dalam peningkatan perekonomian di DIJ. Sebab, tidak banyak sumber daya alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan secara optimal di DIJ. Ia meminta warga Jogja sebagai tuan rumah agar mau memberikan ruang bagi para wisatawan. (*oso/laz/zl*)



Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005